

**IMPLEMENTASI LAPANGAN PEKERJAAN BAGI ORGANISASI MASYARAKAT PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA DI KABUPATEN GRESIK**

**Muhammad Zoffalah Azizurosadi**

(Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya)

[muhammad.14042@mhs.unesa.ac.id](mailto:muhammad.14042@mhs.unesa.ac.id)

**Prof. Dr. H. Murtadlo, M.Pd.**

(Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya)

[murtadlo@unesa.ac.id](mailto:murtadlo@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Lapangan pekerjaan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian penyandang disabilitas netra. Namun, akses terhadap pekerjaan di Kabupaten Gresik masih terbatas akibat kurangnya keterampilan, minimnya aksesibilitas, serta rendahnya penerimaan dunia kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas netra dan mengevaluasi pemenuhan hak mereka dalam dunia kerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian adalah anggota Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) di Kabupaten Gresik yang telah bekerja maupun yang masih mencari pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas bekerja sebagai pemijat (90%), sementara lainnya menjadi guru honorer (3,33%), Aparatur Sipil Negara (3,33%), dan pedagang (3,33%). Kendala utama meliputi keterbatasan pelatihan kerja, rendahnya kepercayaan masyarakat, serta kurangnya kebijakan inklusif. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya kebijakan konkret dalam penyediaan pelatihan keterampilan, fasilitas kerja ramah disabilitas, serta insentif bagi perusahaan agar lebih terbuka dalam mempekerjakan penyandang disabilitas netra. Kesimpulannya, diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Implementasi, Lapangan Pekerjaan, Disabilitas Netra

**Abstract**

Employment plays a crucial role in improving the well-being and independence of visually impaired individuals. However, access to employment in Gresik Regency remains limited due to a lack of skills, minimal accessibility, and low acceptance in the workforce. This study aims to analyze the implementation of employment opportunities for visually impaired individuals and evaluate the fulfillment of their rights in the workplace. This research employs a qualitative descriptive method using interviews, observations, and documentation. The focus is on members of the Indonesian Blind Association (Pertuni) in Gresik Regency, both those who are employed and those still seeking jobs. The results indicate that the majority work as massage therapists (90%), while others serve as honorary teachers (3.33%), civil servants (3.33%), and traders (3.33%). The main challenges include limited job training, low public trust, and a lack of inclusive policies. The implications of this study highlight the need for concrete policies in providing skills training, disability-friendly work facilities, and incentives for companies to employ visually impaired individuals. In conclusion, synergy between the government, companies, and society is essential to creating more inclusive and sustainable employment opportunities.

**Keywords :** Implementation, Employment, Visual Disabilities

**PENDAHULUAN**

Lapangan pekerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu, termasuk bagi penyandang disabilitas. Bekerja tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi diri, peningkatan kesejahteraan, serta kontribusi dalam masyarakat. Memastikan kesempatan kerja bagi populasi penyandang disabilitas sangat penting, tidak hanya untuk kemandirian ekonomi mereka tetapi juga untuk mendorong inklusi sosial dan mengurangi

diskriminasi di tempat kerja. (Zhang, 2024)

Bagi penyandang disabilitas, akses terhadap pekerjaan yang layak menjadi indikator inklusivitas dan kesetaraan dalam dunia kerja. Pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka dapat meningkatkan kemandirian, mengurangi ketergantungan pada pihak lain, serta memberikan kesempatan untuk berkembang secara profesional. Manfaat penyandang disabilitas dalam tenaga kerja tidak hanya meningkatkan keberagaman dan inovasi dalam organisasi, tetapi juga berkontribusi pada

## *Implementasi Lapangan Pekerjaan Bagi Organisasi Masyarakat Persatuan Tunanetra Indonesia di Kabupaten Gresik*

pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan sosial dengan mengurangi ketergantungan serta meningkatkan kemandirian finansial (Gutterman, 2024).

Para ahli dan akademis lainnya memberikan berbagai macam pengertian atau pendapat tentang implementasi. Hal ini perlu disampaikan, agar pengertian dan pemahaman terkait implementasi bisa selaras atau sama. Karena implementasi sendiri merupakan suatu kegiatan yang penting dari seluruh proses perencanaan keputusan. Terdapat berbagai macam pengertian implementasi.

Implementasi merujuk pada proses di mana kebijakan dan program diterapkan, melibatkan aktor pemerintah maupun non-pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Aliu & Skenderi, 2023). Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diartikan implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan adanya keputusan atau kebijakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Disabilitas netra, atau tunanetra, mengacu pada kondisi di mana seseorang mengalami gangguan penglihatan yang signifikan sehingga memerlukan alat bantu atau teknik khusus untuk menjalani aktivitas sehari-hari. (Rajesh, 2023). Disabilitas netra juga harus dapat memaksimalkan indera lain yang dimilikinya. Disabilitas netra sendiri dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu kurang lihat (*low vision*) dan buta total (*totally blind*). Seorang dikatakan sebagai kurang lihat (*low vision*) apabila seseorang memiliki penglihatan yang buram dalam melihat suatu objek tertentu, sehingga perlu adanya alat bantu optik untuk menunjang penglihatannya (Gilbert, 2017). Seseorang dikatakan sebagai buta total (*totally blind*) apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk melihat sama sekali atau hanya mampu melihat cahayanya sehingga harus memaksimalkan alat indera lainnya (Ardhi, 2013).

Penyandang disabilitas netra di Kabupaten Gresik yang dinaungi oleh organisasi masyarakat pertuni di Kabupaten Gresik memiliki total 30

anggota yang aktif untuk melakukan kegiatan organisasi. Seperti kegiatan silaturahmi antar anggota, penyaluran bantuan dari pemerintah, dan sosialisasi. Anggota organisasi masyarakat pertuni di Kabupaten Gresik bekerja sebagai pemijat dan mengandalkan penghasilan harian yang tidak tetap. Adapun anggota organisasi masyarakat pertuni di Kabupaten Gresik yang bekerja sebagai guru honorer, Aparatur Sipil Negara, dan pedagang.

Menurut sensus penduduk, “lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha atau perusahaan atau instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja”. Dapat diartikan juga bahwa lapangan pekerjaan merupakan ketersediaan kerja untuk para tenaga kerja. Dari tiap-tiap sektor lapangan pekerjaan itu akan memberikan peluang bagi calon tenaga kerja. Bagi seseorang yang lebih kreatif tentu memiliki peluang untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan sendiri. Penciptaan sebuah lapangan kerja serta peningkatan angka produktivitas di tiap-tiap kegiatan dapat memberikan dampak yaitu menambahnya pendapatan bagi penduduk yang bersangkutan (Thu, Hang. 2025).

Lapangan pekerjaan sangat diperlukan bagi tiap-tiap individu, baik pekerjaan swasta, wiraswasta, wiraswasta, PNS, dan lain sebagainya. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, yang tercantum pada hukum ketenagakerjaan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hukum ketenagakerjaan yang mengatur tentang semua aspek yang berhubungan dengan adanya tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah diatur hak-hak bagi para penyandang disabilitas yang bertujuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

Disabilitas Netra, terutama kebutaan total, secara signifikan memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan berpartisipasi dalam pekerjaan tanpa dukungan dan rehabilitasi yang memadai. Individu tunanetra sering kali membutuhkan alat bantu, teknik adaptif, serta pelatihan khusus untuk meningkatkan kemandirian mereka dan memungkinkan kontribusi yang produktif dalam berbagai bidang (Onabolu, et al. 2018)

## *Implementasi Lapangan Pekerjaan Bagi Organisasi Masyarakat Persatuan Tunanetra Indonesia di Kabupaten Gresik*

Penyandang Disabilitas Netra memiliki hak untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak. Pemerintah Indonesia telah menyusun dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 53 ayat (1) yaitu berisi tentang peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di pemerintah dan juga pihak swasta lainnya. Yang berjumlah setidaknya 2% dari total pegawai yang dikerjakan oleh pihak pemerintah dan swasta lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah di Kabupaten Gresik sudah terpenuhi hak-hak di bidang lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Sudharma, 2017), yang lebih menyoroti aspek regulasi dan implementasi kebijakan tenaga kerja disabilitas tanpa melihat secara spesifik pengalaman mereka dalam memperoleh pekerjaan. Sementara itu, penelitian oleh (Aprilia et al. 2019) lebih berfokus pada kebutuhan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja. Berbeda dari kedua penelitian tersebut, penelitian ini secara spesifik mengkaji pengalaman penyandang disabilitas netra dalam mengakses lapangan pekerjaan di Kabupaten Gresik, hambatan yang mereka hadapi, serta sejauh mana kebijakan yang ada telah diterapkan.

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi lapangan pekerjaan bagi anggota masyarakat pertuni di Kabupaten Gresik, apakah hak memperoleh lapangan pekerjaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pendidikan luar biasa khususnya disabilitas netra bagi masyarakat Kabupaten Gresik. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Gresik untuk lebih aktif memaksimalkan keahlian bekerja penyandang disabilitas netra yang dinaungi oleh organisasi masyarakat pertuni di Kabupaten Gresik.

### **METODE**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong. 2017 : 6). Penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan (Sugiono. 2018). Jenis penelitian yang akan digunakan ialah deskriptif kualitatif. Menurut Setyosari (2015), “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan gejala dalam penelitian tanpa memberikan perlakuan apapun”. Penelitian disusun dengan sistematis dan akurat sesuai dengan fakta yang ada pada tempat penelitian (Suryabrata, 2014). Peneliti memilih jenis penelitian ini karena penelitian yang dilakukan saling berhubungan dengan subjek secara langsung dan sesuai fakta yang ada dilapangan.

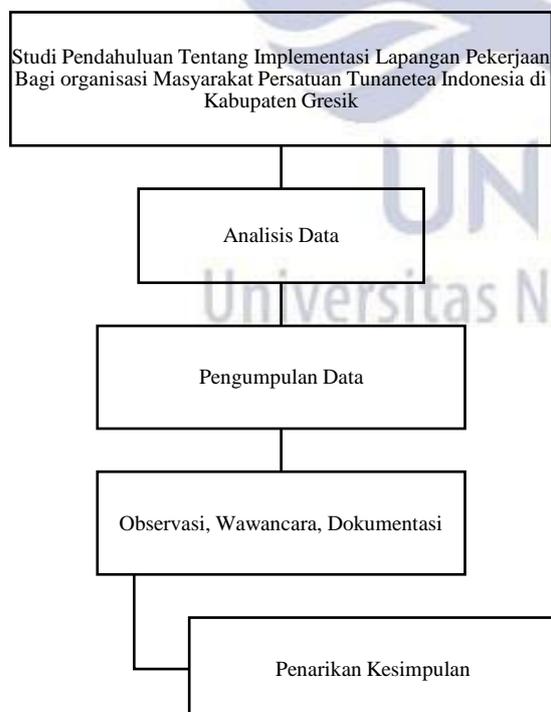
Setiap penelitian memiliki rancangan penelitian yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas penelitian serta memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat menjawab topik dari penelitian. Rancangan penelitian terlebih dahulu yang tertuang dalam proposal penelitian dan berisikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian lokasi serta subjek penelitian (Muhammad. 2013). Penelitian kualitatif tidak disusun secara kaku dan ketat, sehingga rancangan penelitiannya dapat berubah sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi dengan alat perlengkapan yang mendukung seperti perekam suara dan kamera. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat abstrak. Sehingga memiliki langkah-langkah penelitian yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Langkah-langkah penelitian kualitatif menurut satori dan komariah (2017) adalah sebagai berikut : (a) Menentukan fokus penelitian, (b) Mengumpulkan data, (c) Mengolah data, (d) Mendeskripsikan dan membahas hasil penelitian, (e) Melakukan pemeriksaan keabsahan data, dan (f) Memberikan laporan hasil penelitian.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari ketua

## Implementasi Lapangan Pekerjaan Bagi Organisasi Masyarakat Persatuan Tunanetra Indonesia di Kabupaten Gresik

organisasi masyarakat Persatuan Netra Indonesia di Kabupaten Gresik yang bernama Andri Bagus Sugiarto. Penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara dalam mengumpulkan data. Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasi pasif, dengan mengamati apa yang dilakukan subjek tanpa ikut serta dalam mengintervensi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semiterstruktur, dimana subjek diminta pendapat, dan ide idenya, tujuan dari wawancara ini.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dalam penelitian secara sistematis, kemudian dikategorikan, dipilih yang pokok dan penting, dan disimpulkan agar dapat dimengertidari hasil penelitian (Sugiyono, 2018: 244). Proses analisis data memiliki tahap, yaitu sebelum dilapangan penelitian, selama proses penelitian dilapangan, dan sesudah penelitian dilapangan. Analisis data sebelum dilapangan penelitian yaitu pada saat melakukan studi pendahuluan untuk menentukan fokus penelitian (Sugiyono, 2018: 245). Analisis ketika dilapangan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang memiliki beberapa tahap (Sugiyono, 247 – 253) sebagai berikut : (a) Pengumpulan data, (b) Mengubah data, (c) Penyajian data, dan (d) Penarikan kesimpulan dan verifikasi.



Bagan 1 Alir Pelaksanaan Penelitian  
Bagan alir penelitian ini menggambarkan

tahapan-tahapan penelitian secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Alur ini memberikan visualisasi yang lebih terstruktur dan memudahkan pemahaman mengenai proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini.

Kisi-kisi instrumen penelitian digambarkan pada diagram berikut:

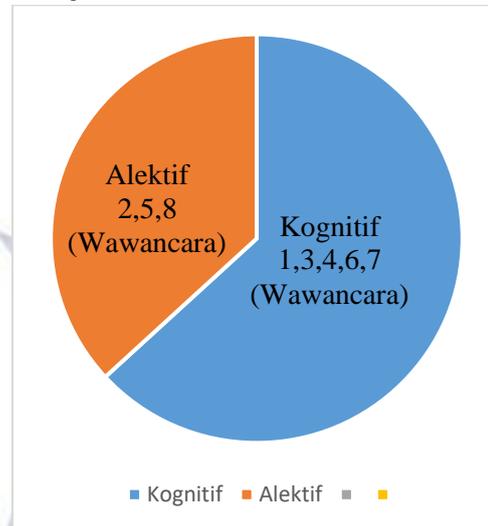


Diagram 1 Kisi-kisi Instrumen Wawancara

Instrumen penelitian meliputi aspek kognitif dan aspek alektif. Pada Aspek Kognitif terdapat 4 pertanyaan yang membahas tentang tentang kondisi pekerjaan anggota Persatuan Netra Indonesia (Pertuni) di Kabupaten Gresik, termasuk jenis pekerjaan yang mereka jalani, alasan pemilihan profesi tertentu, strategi dalam menjalankan usaha, serta kemungkinan adanya pekerjaan lain di luar bidang pijat. Aspek Afektif berfokus pada perasaan, harapan, dan aspirasi anggota Pertuni. Wawancara ini menggali alasan pribadi mereka dalam memilih profesi tertentu, tantangan emosional yang dihadapi, serta harapan Ketua 2 Pertuni terhadap pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang tunanetra.

### HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Lapangan Pekerjaan Bagi Organisasi Masyarakat Persatuan Tunanetra Indonesia di Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, terdapat berbagai jenis pekerjaan yang dimiliki oleh disabilitas netra di Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas bekerja sebagai pemijat (90%), sementara lainnya menjadi guru honorer (3,33%), Aparatur Sipil Negara (3,33%), dan pedagang

## *Implementasi Lapangan Pekerjaan Bagi Organisasi Masyarakat Persatuan Tunanetra Indonesia di Kabupaten Gresik*

(3,33%). Namun, pilihan pekerjaan bagi mereka masih sangat terbatas, sehingga kesempatan untuk bekerja di berbagai sektor masih menghadapi banyak kendala.

Disabilitas netra yang berada di Kabupaten Gresik sebagian besar bekerja sebagai pemijat, juga ada sebagian kecil yang bekerja sebagai guru honorer maupun Aparatur Sipil, dan sebagai pedagang minyak oihah dan parfum. Berbagai macam kendala juga dialami bagi disabilitas netra di Kabupaten Gresik dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Mulai dari kurang minat masyarakat untuk pijat terapi netra, minimnya gaji guru honorer, mahalnya transportasi kendaraan umum, terbatas sarana alat bantu, dan minimnya modal untuk melakukan usaha dagang.

Pemerintah Kabupaten Gresik pernah memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra di Kabupaten Gresik yaitu berupa pelatihan pijat terapi dan juga bantuan modal usaha. Harapan besar untuk pemerintah bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra yaitu terpenuhinya hak-hak memperoleh pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Agar kedepannya penyandang disabilitas dapat memaksimalkan keahlian mereka dibidang perusahaan.

Para penyandang disabilitas netra dapat memaksimalkan indera lainnya untuk kehidupan sehari-hari seperti indera peraba. Oleh karena itu disabilitas netra di kabupaten Gresik bekerja sebagai pemijat terapis yang mana pekerjaan tersebut memaksimalkan indera peraba mereka. “Karena tidak memerlukan banyak modal dan juga penyandang disabilitas netra dapat memaksimalkan indera peraba untuk melakukan terapi pijat”. Dan juga sebagai pemijat terapis tidak memerlukan modal yang banyak karena hanya mengandalkan keahlian dan ilmu pijat terapis.

Banyak cara yang dilakukan disabilitas netra di Kabupaten Gresik mempromosikan jasa pijat terapis contohnya seperti seperti Facebook dan Whatsapp untuk menarik minat pelanggan yang ingin melakukan pijat terapi. “Pasang papan nama di depan rumah lalu dipromosikan melalui media sosial Facebook dan Whatsapp. Apabila ada yang mau pijat biasanya menghubungi nomor Whatsapp yang tersedia pada Facebook dan papan nama di depan rumah untuk menentukan jadwal pijatnya, pijat panggilan atau di tempat dan menentukan jam berapa pijatnya”. Hal tersebut dilakukan setiap hari

untuk memperoleh pendapatan demi mencukupi kehidupan sehari-hari.

Adapun disabilitas netra di Kabupaten Gresik yang memiliki pekerjaan selain pemijat. “Ada, hanya sebagian kecil saja seperti guru honorer, guru Aparatur Sipil Negara, penjual minyak pijat dan parfum”. Meskipun penyandang disabilitas netra memiliki hambatan dalam penglihatan, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka bisa bekerja sebagai guru honorer dan Aparatur Sipil Negara di sekolah inklusi yang ada di Kabupaten Gresik. Dan juga ada yang bekerja sebagai pedagang, menjual produksi mereka seperti minyak pijat dan juga parfum.

Masih terdapat keterbatasan dalam ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih bervariasi bagi disabilitas netra. Beberapa sektor yang berpotensi menyediakan pekerjaan bagi mereka, seperti layanan customer service berbasis suara, transkripsi, dan perakitan produk sederhana, masih kurang dikembangkan di Kabupaten Gresik. Selain itu, akses terhadap pelatihan kerja dan fasilitas kerja yang mendukung masih sangat terbatas. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperluas jenis pekerjaan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra, baik melalui kebijakan pemerintah, peran sektor swasta, maupun pemberdayaan berbasis komunitas.

Berbagai macam kendala dialami oleh anggota Persatuan Netra Indoensia di Kabupaten Gresik dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Sebagai pemijat kendala utama yang dialami yaitu minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pemijat disabilitas netra. “Kendala pasti ada disetiap pekerjaan yang dijalani. Contohnya pemijat yang kesulitan dalam memasarkan jasa pijat, ada yang tidak punya tempat sehingga hanya menerima pijat panggilan saja, minimnya pelatihan pijat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik”. Sebagai guru kendala yang dialami terletak pada minimnya gaji, mahalnya transportasi, serta minimnya alat bantu seperti laptop dikarenakan harganya yang mahal. “Lalu guru honorer dan Aparatur Sipil Negara, untuk guru honorer gaji sangat minim sehingga gaji tidak sebanding dengan ongkos transportasi, untuk guru Aparatur Sipil Negara gaji sudah lumayan tapi sama permasalahannya di transportasi. Dan juga mahalnya sarana alat bantu seperti laptop/komputer bicara”. Bagi penjual hal yang menjadi kendala adalah kurang modal yang dimiliki untuk membeli bahan dasar yang akan dikelola dan juga diperlukan

## *Implementasi Lapangan Pekerjaan Bagi Organisasi Masyarakat Persatuan Tunanetra Indonesia di Kabupaten Gresik*

biaya transportasi yang mahal. “Untuk penjual minyak pijat dan parfum minimnya modal usaha mengakibatkan sedikitnya barang yang bisa dibeli, dan ongkos perjalanan yang diperlukan juga banyak. Sehingga tidak sebanding dengan keuntungan yang bisa didapat”. Meskipun berbagai macam kendala yang dialami, disabilitas netra di Kabupaten Gresik masih bersemangat dalam melakukan pekerjaan mereka demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah dijelaskan hak dan kewajiban bagi penyandang disabilitas salah satunya yaitu memperoleh pekerjaan. Anggota organisasi masyarakat Persatuan Tunanetra Indonesia di Kabupaten Gresik belum mendapatkan hak-hak mereka dibidang pekerjaan. Dikarenakan minimnya keahlian yang diminta oleh perusahaan serta kurangnya layanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas netra. “Belum, dikarenakan sebagian besar tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki disabilitas netra tersebut”. Hal tersebut mempengaruhi kondisi ekonomi disabilitas netra di Kabupaten Gresik, karena hanya mengandalkan pemasukan harian tidak tetap.

Pemerintah di Kabupaten Gresik juga pernah memberikan bantuan untuk memfasilitasi organisasi masyarakat Persatuan Tunanetra Indonesia di Kabupaten Gresik dalam melakukan usaha pijat. “Iya. Bantuan dalam bentuk pelatihan pijat dan bantuan modal usaha”. Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi anggota masyarakat Persatuan Tunanetra Indonesia di Kabupaten Gresik karena dapat membantu meningkatkan keahlian pijat terapi dan kebutuhan hidup sehari-hari.

Hal yang paling ditekankan oleh beliau adalah agar pemerintah lebih memperhatikan undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Agar kedepannya penyandang disabilitas khususnya bagi disabilitas netra di Kabupaten Gresik dapat memanfaatkan keahlian mereka dibidang perusahaan. “Harapan saya agar pemerintah Kabupaten Gresik dapat menjalankan amanah undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas yaitu perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dan untuk perusahaan negeri wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang

disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Seperti misal disuatu perusahaan terdapat 1000 pegawai maka harus ada 10 tenaga kerja penyandang disabilitas. Contoh terdapat 10 penyandang disabilitas netra maka perusahaan dapat memberdayakan untuk memijat tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut dan digaji dengan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja”.

### **PEMBAHASAN**

Lapangan pekerjaan bagi disabilitas netra di Kabupaten Gresik kebanyakan adalah di bidang wirausaha. Wirausaha yang dilakukan oleh disabilitas netra di Kabupaten Gresik ada yang menjual jasa (tukang pijat) ataupun yang menjual barang (berdagang). Meskipun kebanyakan disabilitas netra di Kabupaten Gresik bekerja sebagai wirausaha, tetapi ada juga disabilitas netra di Kabupaten Gresik yg bekerja di bidang pendidikan yaitu sebagai guru Aparatur Sipil Negara di salah satu UPT Sekolah di Kabupaten Gresik.

Penelitian ini cukup relevan dengan (Sudharma, 2017) yang dalam penelitiannya membahas tentang kesetaraan hak dan posisi penyandang disabilitas dalam bidang pekerjaan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Penyandang Disabilitas tidak disertai dengan pelaksanaan di lapangan. Memastikan dalam tempat kerja bagi penyandang disabilitas memerlukan pendekatan yang seimbang dalam kontrak kerja, meminimalkan diskriminasi, dan mendorong kesetaraan dalam kebijakan serta praktik organisasi (Baldrige. 2022).

Penerapan prinsip keseimbangan dalam ketenagakerjaan kontrak penyandang disabilitas telah dilaksanakan dengan baik karena semua peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan pada kontrak kerja bagi penyandang disabilitas. Kebijakan ketenagakerjaan nasional harus melampaui undang-undang disabilitas yang ada untuk benar-benar mengakomodasi kebutuhan individu dengan disabilitas dalam lingkungan kerja (Parekh. 2024).

Penelitian ini juga relevan dengan (Aprilia, et al. 2019) yang dalam penelitiannya membahas tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Masyarakat penyandang disabilitas perlu diberikan pelatihan *soft skill* dan juga *hard skill* agar dapat dijadikan bekal untuk hidup dalam masyarakat sosial serta pengembangan karir (Dobrowolska,

2024).

Penelitian ini juga relevan dengan (Tjahjanti, 2018) yang dalam penelitiannya membahas tentang cara membantu penyandang disabilitas dalam berwirausaha untuk meningkatkan ekonomi. Motivasi dalam berwirausaha bagi penyandang disabilitas yaitu keinginan menyertakan dengan individu normal, meningkatkan harga diri, saling membantu sesama disabilitas, melakukan kegiatan sosial dengan masyarakat, dan untuk mencukupi nafkah diri sendiri maupun keluarga (Caldwell, 2020).

Motivasi berwirausaha bagi penyandang disabilitas merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kemandirian dan partisipasi ekonomi mereka. Pelatihan kewirausahaan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan motivasi berwirausaha pada individu disabilitas (Perez-Macias, 2022).

Untuk mencapai akses yang inklusif, pemerintah sebaiknya mensubsidi fitur-fitur aksesibilitas dalam bangunan dan melibatkan penyandang disabilitas dalam proses desain bangunan. Selain itu, diperlukan peningkatan dan penegakan legislasi aksesibilitas, serta program pelatihan untuk profesional bangunan guna meningkatkan kesadaran dan sikap terhadap aksesibilitas (Flemmer, McIntosh, 2025).

Pemberdayaan berbasis komunitas dapat menjadi solusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih beragam dan berkelanjutan. Program rehabilitasi berbasis komunitas memainkan peran penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas dengan menciptakan peluang kerja yang beragam dan berkelanjutan sesuai dengan keterampilan mereka serta kondisi ekonomi lokal (Khyat, Juni, 2024). Dengan adanya sinergi dari berbagai pihak, diharapkan penyandang disabilitas netra dapat lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki kesempatan yang lebih luas dalam dunia kerja.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah sampel yang digunakan masih terbatas pada anggota Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) di Kabupaten Gresik, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi disabilitas netra di daerah lain. Kedua, penelitian ini berfokus pada perspektif penyandang disabilitas netra, sementara perspektif dari pengusaha dan pihak pemerintah terkait belum dikaji secara mendalam. Ketiga, faktor ekonomi dan sosial yang lebih luas, seperti

dampak regulasi ketenagakerjaan atau peran teknologi dalam membuka peluang kerja bagi disabilitas netra, belum menjadi bagian dari kajian ini.

Solusi dalam mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak sampel dari berbagai daerah agar hasilnya lebih representatif. Selain itu, pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengikutsertakan perspektif pengusaha dan pemerintah dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai tantangan dan peluang ketenagakerjaan bagi disabilitas netra. Penelitian di masa depan juga dapat mengkaji lebih dalam aspek ekonomi dan sosial, termasuk pengaruh kebijakan ketenagakerjaan serta peran teknologi dalam menciptakan peluang kerja yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas netra.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dalam menciptakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra. Pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan peran mereka dalam menyediakan pelatihan keterampilan yang sesuai, membangun aksesibilitas di lingkungan kerja, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Lapangan Pekerjaan Bagi Organisasi Masyarakat Persatuan Tunanetra Indonesia di Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik. Disabilitas Netra bekerja sebagai pemijat, guru honorer, Aparatur Sipil Negara, dan pedagang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa anggota Pertuni sebagian besar telah bekerja dan sebagian kecil dalam proses pencarian pekerjaan.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih inklusif dalam menciptakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra. Pemerintah perlu meningkatkan akses terhadap pelatihan keterampilan, menyediakan fasilitas kerja yang ramah disabilitas, serta memberikan insentif bagi perusahaan agar lebih terbuka dalam mempekerjakan tenaga kerja disabilitas. Selain itu, keterlibatan komunitas dalam pemberdayaan ekonomi disabilitas netra, seperti program wirausaha berbasis komunitas, dapat menjadi alternatif solusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih beragam dan berkelanjutan.

## *Implementasi Lapangan Pekerjaan Bagi Organisasi Masyarakat Persatuan Tunanetra Indonesia di Kabupaten Gresik*

Saran terhadap Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Gresik dapat lebih memperhatikan para penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra. Dikarenakan perlu fasilitas aksesibilitas yang memadai agar dapat memudahkan penyandang disabilitas netra dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Serta dapat lebih memberdayakan penyandang disabilitas netra untuk ber usaha dengan cara menggunakan jasa pijat terapi dan membeli barang yang diproduksi oleh penyandang disabilitas netra yang ada di Kabupaten Gresik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aan, Komariah & Djam'an Satori. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Aliu, Ylber & Skenderi, Nagip. (2023). ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF EMPLOYMENT POLICIES IN KOSOVO. *Seybold Report*. 18. 2173-2185. [10.17605/OSF.IO/K59EG](https://doi.org/10.17605/OSF.IO/K59EG).
- Amit. (2018). *Penggunaan Tongkat Pada Peserta Didik Tunanetra SMALB Dalam Melakukan Mobilitas*. Paper Knowledge . Towarda Media History of Documents, 2–31. <http://repository.upi.edu/id/eprint/34402>
- Aprilia, Imas Diana. et al. (2019). *Analisis Kebutuhan Pelatihan Kewirausahaan: Sebuah Upaya Pengembangan Kemandirian Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas*. Jurnal Penelitian: Universitas Pendidikan Indonesia. <https://doi.org/10.17509/jpp.v19i3.22329>
- Atmaja, J. R. (2018). *Pendidikan Dan Bimbingan Anak BerkebutuhanKhusus*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Baldrige, et al. (2022). Rethinking Workplace Inclusion of Persons with Disabilities Through Multiple Levels and Lenses. *Academy of Management Proceedings*. 2022. [10.5465/AMBPP.2022.11361symposium](https://doi.org/10.5465/AMBPP.2022.11361symposium).
- Caldwell, Kate & Harris, Sarah & Renko, Maija. (2020). Inclusive Entrepreneurship and Motivation Among People With Intellectual Disability: “Why They Act”. *Intellectual and Developmental Disabilities*. 58. 499-512. [10.1352/1934-9556-58.6.499](https://doi.org/10.1352/1934-9556-58.6.499).
- Dobrowolska, et al. (2024). Research on Development Needs in the Context of Innovative Methods of Providing Soft Skills and Professional Training through Virtual Reality to Persons with Disabilities – The Case of Poland. *Przegląd Badań Edukacyjnych*. 1. 173-196. [10.12775/PBE.2024.009](https://doi.org/10.12775/PBE.2024.009).
- Flemmer, Claire & McIntosh, Alison. (2025). Equitable Access to the Built Environment for People with Disability. *Athens Journal of Technology & Engineering*. 12. 41-54. [10.30958/ajte.12-1-3](https://doi.org/10.30958/ajte.12-1-3).
- Gilbert, Clare & Bowman, Richard & Malik, Aeesha. (2017). The epidemiology of blindness in children: *Changing priorities*. *Community Eye Health*. 30. 74-77.
- Gutterman, Alan. (2024). Creating a Disability Inclusive Workplace. *Businesses and Human Rights of Persons with Disabilities*. [https://www.researchgate.net/publication/387368352\\_Creating\\_a\\_Disability\\_Inclusive\\_Workplace](https://www.researchgate.net/publication/387368352_Creating_a_Disability_Inclusive_Workplace)
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Khyat, Juni et al. (2024). Empowering Individuals With Disabilities Through Community-Based Rehabilitation: An Experience Of The Buds Approach In Kerala. <https://www.researchgate.net/publication/379661926>
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. A. (2013). *Metodelogi Penelitian*. 66–79.
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV. <https://onsearch.id/Record/IOS3107.UM.S:58147>
- Onabolu, et al. (2018). Rehabilitation and Paid Employment for Blind People in a Low Income Country. *Journal of Advances in Medicine and Medical Research*. 25. 1-9. [10.9734/JAMMR/2018/39856](https://doi.org/10.9734/JAMMR/2018/39856).
- Parekh, Riddhi & Pandya, Mayuri. (2024). Beyond The Indians With Disabilities Act: A National Employment Policy For The

## *Implementasi Lapangan Pekerjaan Bagi Organisasi Masyarakat Persatuan Tunanetra Indonesia di Kabupaten Gresik*

- People With Disability. *Vidya - A Journal Of Gujarat University*. 3. 181-186. [10.47413/eatpxq33](https://doi.org/10.47413/eatpxq33).
- Perez-Macias, Noemi. (2022). Resilience and entrepreneurial intentions of people with disabilities: in search of the Sustainable Development Goals (SDGs). *F1000Research*. 11. 726. [10.12688/f1000research.113565.1](https://doi.org/10.12688/f1000research.113565.1).
- Rahmah, S. (2020). *Penerimaan Diri Bagi Penyandang Disabilitas Netra*. Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(2), 1-16. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i2.3380>
- Rajesh, Neve & Himmat, Khairnar & Gamane, Amrisha & Hiranman, Prof. (2023). Blind People Helping Hand. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*. 11. [3536-3551. 10.22214/ijraset.2023.51014](https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.51014).
- Setyosari, Punaji. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan*. Edisi Keempat. Jakarta: Prenamedia Group.
- Sudharma, K. J. A. (2017). *Implementasi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Kerja bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang Diterapkan oleh Yayasan Nirlaba di Provinsi Bali*. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2), 203-214. <https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.1977>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. (2014). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahida, Agung, Bayu. (2014). *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang* (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat). <http://repository.unwira.ac.id/6707/7/BAB%20VI.pdf>
- Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Taufik, Mhd. & Isril. (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2.
- Thu, Hang & Anh, Think & Thi, Tuyet. (2025). Situation of Employment Creation for Disabled Workers in Vietnam After the COVID-19 Pandemic. *Revista de Gestão Social e Ambiental*. 19. [e011241. 10.24857/rgsa.v19n2-033](https://doi.org/10.24857/rgsa.v19n2-033).
- Tjahjanti, Prantasi Harmi. et al. (2018). Strategi Membantu Wirausaha Disabilitas untuk Memberdayakan Ekonomi Secara Berkelanjutan. *Abdimas Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*. <http://dx.doi.org/10.17977/um050v2i1p37-43>
- Widjaya, Ardhi. (2013). *Seluk Beluk ATN*. Yogyakarta: Java Litera.
- Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Edisi Pertama. Jakarta: kencana.
- Zhang, Jiaxuan. (2024). Analysis and Research on the Survival and Employment Situations of Disabled Populations. *Frontiers in Business, Economics and Management*. 16. 148-151. [10.54097/t66hv168. https://www.researchgate.net/publication/384391122\\_Analysis\\_and\\_Research\\_on\\_the\\_Survival\\_and\\_Employment\\_Situations\\_of\\_Disabled\\_Populations](https://www.researchgate.net/publication/384391122_Analysis_and_Research_on_the_Survival_and_Employment_Situations_of_Disabled_Populations)